

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi meningkat (Anjar:2010).

Dikeluarkan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah melahirkan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma tersebut berupa tuntutan dilakukannya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*publik oriented*). Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan

informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik (Mardiasmo:2002:32). Dalam UU Nomor 22 tahun 1999, dijelaskan bahwa undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama, dan bidang lainnya.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD. Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Adapun faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di

daerah. Faktor kedua yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Dana Perimbangan yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Faktor ketiga yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Rendy:2011).

Di dalam katalog BPS (2013:4) PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang didalamnya memuat berbagai instrumen ekonomi penting, PDRB perkapita, peranan sektor-sektor ekonomi disuatu daerah. Semakin tinggi PDRB, maka pertumbuhan ekonomi otomatis akan meningkat dan pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edgar (2010) yang menyatakan bahwa ketika pendapatan perkapita semakin besar, maka semakin besar

pula pengeluaran dari suatu daerah. Dengan pendapatan masyarakat yang semakin besar maka pajak/retribusi yang akan masuk ke pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan. Semakin besar PAD yang dihasilkan suatu daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

TABEL 1: Perubahan Belanja Daerah, Dana Perimbangan, PDRB, Kabupaten Bone Bolango Tahun 2009-2013

Tahun	Belanja Daerah	Dana Perimbangan	PDRB
2009	326.659.823.749,00	297.595.066.405,00	828.136.000.000,00
2010	322.765.401.583,00	312.170.424.730,00	916.111.000.000,00
2011	411.641.648.311,00	318.637.523.275,00	1.019.512.000.000,00
2012	452.939.914.165,00	376.550.311.400,00	1.108.036.000.000,00
2013	548.809.492.071,00	431.415.589.695,00	1.217.568.000.000,00

Sumber: DPPKAD dan Badan Pusat Statistik Kab. Bone Bolango, yang diolah

Dari tabel 1 terlihat bahwa belanja di Kabupaten Bone Bolango mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan jumlah belanja daerah pada tahun 2010, sedangkan dana perimbangan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013. Untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena/masalah bagi pemerintah daerah dalam penetapan belanja daerah karena tidak sesuai dengan meningkatnya Dana Perimbangan.

PDRB Kabupaten Bone Bolango atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar 1.217.568,52 (juta rupiah) lebih tinggi bila dibanding dengan tahun 2012 yang sebesar 1.108.036 (juta rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 9,89 persen. Adapun untuk PDRB atas dasar konstan

tahun 2013 sebesar 345.211,91 (juta rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 7,46 persen bila dibanding dengan PDRB harga konstan tahun 2012 yang hanya sebesar 321.254 (juta rupiah). Ini berarti bahwa besarnya nilai tambah bruto yang ditimbulkan oleh seluruh sektor ekonomi yang ada di Bone Bolango bila dihitung dengan harga tahun 2013 (harga berlaku berjumlah 1,2 triliun rupiah. Sedangkan bila dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 besarnya nilai bruto mencapai 321 milyar rupiah.

TABEL 2. PDRB Kabupaten Bone Bolango Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013
1. Konsumsi Rumah Tangga	579 981,82	635 665,90	693 408,93	763 050,19
2. Konsumsi LNPRT	10 144,68	12 250,15	13 736,20	15 016,57
3. Konsumsi Pemerintah	301 562,40	351 457,14	424 610,70	458 284,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	171 370,60	179 923,55	203 062,82	230 837,76
5. Perubahan Stok	41 637,48	46 313,62	52 446,96	56 083,12
6. Ekspor Neto	-173 896,43	-206 098,09	-279 229,60	-305 703,25
PDRB	930 800,54	1 019 512,26	1 108 036,01	1 217 568,52

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango

TABEL 3: PDRB Kabupaten Bone Bolango Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013
1. Konsumsi Rumah Tangga	192 324,36	205 272,29	218 849,74	233 348,58
2. Konsumsi LNPRT	3 502,65	3 812,00	3 944,39	4 139,33
3. Konsumsi Pemerintah	118 915,11	127 636,58	148 398,76	157 199,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	83 960,43	7 419,59	94 201,71	103 068,26
5. Perubahan Stok	12 156,10	12 634,22	13 615,44	14 150,91
6. Ekspor Neto	-130 275,56	-136 863,38	-157 755,43	-166 694,60
PDRB	280 583,08	299 911,29	321 254,61	345 211,91

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango

Sejauh ini banyak pakar ekonomi dan sosil-ekonomi yang berpendapat bahwa semakin maju satu daerah, maka peran konsumsi rumah tangga cenderung semakin kecil. Sebaliknya, semakin tertinggal suatu daerah

maka peran konsumsi rumah tangganya cenderung semakin besar. Di Negara-negara maju yang hampir seluruh masyarakatnya berpendapatan tinggi, terbukti bahwa sebagian besar pendapatannya tidak lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari khususnya konsumsi makanan maupun bukan makanan, melainkan lebih mengarah pendapatannya diperuntukkan investasi, dan yang paling sederhana adalah berupa tabungan. (Katalog No:9302002.7504, BPS Kabupaten Bone Bolango)

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

Peningkatan Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bone Bolango tidak dibarengi dengan peningkatan Belanja Daerah. Fenomena tersebut merupakan masalah yang perlu dikaji, melihat adanya peningkatan jumlah Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan Belanja Daerah pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan seperti yang diketahui bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh suatu Daerah maka semakin besar pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah. Pemerintah daerah mengharapkan belanja daerah dapat dibelanjakan dengan optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan diharapkan mampu menurunkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja. Kabupaten Bone Bolango juga masih mengandalkan Dana Perimbangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah. Hal ini dapat kita lihat bahwa dengan besarnya Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah. Padahal dengan adanya Otonomi Daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango ?
3. Apakah dana perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menguji pengaruh Dana perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango
2. Mengetahui dan menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango
3. Mengetahui dan menguji pengaruh dana perimbangan dan PDRB terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone Bolango

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah dalam proses pengelolaan Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan masukan, terutama bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pengaruh dana perimbangan dan produk domestik regional bruto dalam memprediksi belanja daerah.